

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERSEMBAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT.....	viii
RINGKASAN DISERTASI.....	ix
<i>DISSERTATION SUMMARY</i> .....	liv
KATA PENGANTAR.....	xcvii
DAFTAR ISI.....	c

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Manfaat Penelitian .....	18
E. Kerangka Konseptual.....	19
1. Rekonstruksi .....	19
2. Pemilihan Kepala Daerah .....	21

3.	Pencalonan Perseorangan dan Pencalonan Partai Politik Dalam Pilkada..	25
4.	Konsep Keadilan.....	30
F.	KerangkaTeori .....	34
1.	<i>Grand Theory</i> (Teori Utama): Teori Keadilan.....	34
a.	Teori Keadilan Aristoteles .....	34
b.	Teori Keadilan Plato .....	49
c.	Teori Keadilan John Rawls .....	52
d.	Teori Keadilan Pancasila .....	54
2.	<i>Middle Theory</i> (teori tengah) : Teori Negara Hukum.....	64
3.	<i>Middle Theory</i> (teori tengah) : Teori Demokrasi.....	77
4.	<i>Applied Theory</i> (teori aplikasi) : Teori Kedaulatan Rakyat .....	83
5.	<i>Applied Theory</i> (teori aplikasi) : Teori Hukum Progresif.....	89
G.	Kerangka Pemikiran .....	100
H.	Metode Penelitian .....	101
1.	Paradigma Penelitian .....	101
2.	Sifat Penelitian.....	102
3.	Metode Pendekatan.....	103
4.	Sumber Data .....	106
5.	Teknik Pengumpulan Data.....	109
6.	Teknik Analisis Data .....	111
I.	Orisinalitas/ Keaslian Penelitian.....	113
J.	Sistematika Penulisan .....	116

<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>119</b>
A. Konsep Demokrasi.....	119
1. Pengertian Demokrasi.....	119
2. Penegakan Demokrasi.....	124
3. Model-Model Demokrasi.....	126
4. Demokrasi dalam Prespektif Islam.....	127
B. Pemilihan Umum.....	133
1. Pengertian Pemilihan Umum.....	133
2. Asas Pemilihan Umum.....	136
3. Tujuan /Fungsi Pemilihan Umum.....	141
C. Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah.....	143
1. Pengertian Pemilihan Umum Kepala Daerah.....	147
2. Kelemahan dan Kelebihan Sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah.....	152
D. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.....	154
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai Undang-Undang Pemerintahan Daerah Pertama di Era Transisi Demokrasi di Indonesia..	154
2. Undang-Undang 32 Tahun 2004 sebagai Wujud Penyelenggaraan Otonomi Daerah.....	156
3. Rezim Pemilihan Tidak Langsung dan Rezim Pemilihan Langsung .....	171
E. Penyelenggaraan Pemilihan Umum.....	175
1. Komisi Pemilihan Umum .....	175
2. Panitia Pengawas Pemilu .....	177

F. Kedudukan, Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Peradilan di Indonesia.....	181
1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi.....	181
2. Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi .....	183
3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada .....	185
4. Proses Peradilan di Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilukada.....	189
a. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....	189
b. Jenis Perselisihan Sengketa Hasil Pemilu.....	202
c. Pengertian dan Ruang Lingkup PHPU (Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum).....	204
G. Dinamika Kebijakan Pilkada .....	206

<b>BAB III Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Saat Ini .....</b>	<b>215</b>
A. Telaah Filosofis Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Langsung .....	215
B. Regulasi Pemilihan Kepala Daerah Pasca Reformasi.....	225
1. Kajian Normatif Terhadap Pemilihan Kepala Daerah .....	226
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.....	231
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.....	233

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah .....	234
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota .....	235
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.....	238
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota .....	238
8. Intisari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang) .....	241
C. Pemilihan Pilkada Yang Demokratis dan Responsif. ....	245
1. Metode Demokratis Pemilihan Kepala Daerah .....	245
2. Metode Demokratis Pemilihan Wakil Kepala Daerah .....	248
D. Pengaturan yang demokratis terhadap Pencalonan Pilkada .....	253
1. Pengaturan yang demokratis terhadap calon perseorangan.....	253
2. Pengaturan yang demokratis bagi Calon Petahana.....	256

E. Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Saat Ini.....	256
1. Proses Demokrasi Dalam Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) .....	256
2. Sistem Demokrasi Langsung Melalui Pilkada Langsung .....	260
F. Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018.....	277
G. Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2018.....	301
H. Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2018.....	303
I. Pelaksanaan Calon Perseorangan Di Pilkada Serentak 2018.....	305

<b>BAB IV Kelemahan-Kelemahan Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Saat Ini.....</b>	<b>324</b>
A. Kelemahan Kultur Hukum Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Saat Ini.....	324
1. Kelemahan Aspek Sosial, Politik dan Ekonomi.....	324
2. Kelemahan yang mempengaruhi calon perseorangan dalam Pilkada ....	332
a. Kelemahan Internal.....	332
b. Kelemahan Eksternal .....	333
3. Kelemahan adanya Calon Tunggal dalam Pilkada.....	335
B. Kelemahan Struktur Hukum Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Saat Ini.....	344

C. Kelemahan Substansi Hukum Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Saat Ini.....	353
---	-----

**BAB V Rekonstruksi Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Nilai Keadilan .....380**

A. Konsep Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Menurut Pancasila .....	380
B. Pemilihan Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Beberapa Negara .....	390
1. Negara Malaysia .....	392
2. Negara Amerika Serikat.....	403
3. Negara Australia .....	413
4. Negara Singapura.....	431
5. Negara Arab Saudi.....	439
6. Negara Thailand.....	440
C. Rekonstruksi Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan.....	442
1. Rekonstruksi Nilai/Filosofi.....	442
2. Rekonstruksi Norma Hukum .....	446
3. Penemuan Teori Hukum .....	450

**BAB VI PENUTUP .....451**

A. Simpulan .....	451
-------------------	-----

B. Saran-Saran.....	457
C. Implikasi Kajian Disertasi .....	459
1. Implikasi Teoritis.....	459
2. Implikasi Praktis .....	460
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>461</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>468</b>